

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Riyans Ardiansyah

Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama: Riyans Ardiansyah

E-mail: riyans@borneo.ac.id

Abstract: *Original Local Revenue and Intergovernmental Transfer are sources of regional income that are used to finance regional development. These two sources of income are indicators in determining the level of independence of a region from a financial standpoint. This study aims to determine the level of financial independence of a region using Original Local Revenue and Intergovernmental Transfer as measuring tools. The analytical method used is quantitative descriptive analysis with SPSS 25.00. The data used is secondary data in the form of a report on the realization of the revenue and expenditure budget for the city of Tarakan for 10 years, namely from 2013 to 2022. The data comes from the Tarakan city BPS office. The results of the study show that Original Local Revenue makes a positive and significant contribution to Financial Self-Sufficiency of Local Governments, while Intergovernmental Transfer have a negative influence on Financial Self-Sufficiency of Local Governments in the city of Tarakan. Original Local Revenue and Intergovernmental Transfer simultaneously influence to Financial Self-Sufficiency of Local Governments.*

Keywords: *Original Local Revenue, Intergovernmental Transfer, Financial Self-Sufficiency of Local Governments*

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Kedua sumber pendapatan ini merupakan indikator dalam menentukan tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari sisi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai alat ukurnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan SPSS 25.00. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tarakan selama 10 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2022. Data berasal dari kantor BPS kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah kota Tarakan. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah secara Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah berdampak pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah. Otonomi daerah mengakibatkan terjadinya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk penyusunan program pembangunan daerah), dan perencanaan lainnya, yang dilimpahkan dari Pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan otonomi daerah yang terfokus pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan berpindahnya beberapa kewenangan atas alokasi sumber daya untuk belanja daerah, mengikuti prinsip kesesuaian dengan anggaran, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintahan daerah sendiri dapat dilaksanakan dengan dukungan berbagai sumber daya yang dapat menggerakkan roda organisasi untuk mencapai tujuannya.

Halim (2011:253) menjelaskan bahwa ciri utama daerah yang dapat melaksanakan otonomi daerah, adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Strategi negara yang bertumpu pada otonomi daerah, dengan menerapkan kebijakan desentralisasi, berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas dan mudah

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

dilihat dari pertumbuhan dana transfer yang diarahkan ke daerah dari tahun ke tahun. Dengan bantuan kebijakan desentralisasi diharapkan daerah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berhak mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan jasa, dan partisipasi semua orang.

Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang dianggap sah. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah. Termasuk Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2002), PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut.

Dalam memperoleh PAD, daerah harus mampu mengembangkan dan mengoptimalkan segala peluang daerah yang dapat diperoleh dari daerah yang

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

bersangkutan. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun prakiraan (estimasi) pendapatan daerah yang sangat akurat seringkali muncul, sehingga tidak dapat dipungut secara optimal. Dengan bantuan UU No. 33 Tahun 2004, kemungkinan daerah mendapatkan dana dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang berasal dari daerah seharusnya mengarah pada eksternalisasi yang lebih positif dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari beberapa bagian yaitu: bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan utama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, maka pemerintah pusat melakukan kebijakan melalui dana perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN (Widjaja, 2002). Dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Elmi (2003) dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dalam UU No.33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Mutiara (2008) dana transfer dari Pemerintah Pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya meningkatnya pendapatan daerah tidak selalu berimbang pada meningkatnya pertumbuhan daerah tersebut.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah mencakup desentralisasi

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

keuangan dimana daerah memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan yang tinggi. Di era otonomi ini, daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian keuangannya untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah, ketergantungan terhadap APBN harus dikurangi, sejalan dengan peningkatan derajat kemandirian daerah (Ardi, 2007: 12). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal. Semakin tinggi angka kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan luar (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) dan sebaliknya.

Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.”

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah yang dikumpulkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dibandingkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah dari pemerintah kota. Pendapatan daerah yang dikelola sendiri adalah ukuran utama kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan

efektivitas pendapatan asli daerah dengan membandingkan pendapatan asli daerah yang dianggarkan dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang sebenarnya merupakan dana yang diambil dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi daerah yang sebenarnya. Jika struktur pendapatan daerah dari sumbernya sendiri kuat di masa depan, kita dapat mengatakan bahwa sektor tersebut memiliki kemampuan keuangan yang kuat. Untuk itu tentunya diperlukan struktur industri yang kokoh serta subjek praja dan pajak yang patuh.

Beberapa penelitian terkait pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam hubungannya dengan kemandirian keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Andriani dan wahid (2018) melakukan penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah, studi kasus pada pemerintah kota Tasikmalaya tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Demikian juga penelitian Malau dan Parapat (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian Nurkhayati (2022) menyimpulkan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Demikian juga penelitian Machfud, dkk (2020) menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah kota Tarakan dalam melaksanakan otonomi daerah berada dibawah pemerintah provinsi Kalimantan utara. Sebagai daerah yang baru hasil pemekaran, kota Tarakan memiliki pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan. Agar supaya daerah ini mampu berdiri secara mandiri dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. selain itu dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat harus mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menjadi pendorong ekonomi dan peningkatan kesejahteraan daerah. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif

kausalitas. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain (Umar, 2003). Menurut Sugiyono (2013:13) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variable terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat). Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini berupaya menggambarkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan data sekunder. Data berasal dari badan pusat statistic (BPS) kota Tarakan. Data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran dan belanja daerah kota Tarakan periode 2013-2022. Data dianalisis menggunakan alat analisis SPSS 25.00. Sebelum melakukan analisis data peneliti melakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, linieritas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah itu peneliti melakukan uji regresi baik secara parsial maupun simultan untuk melihat pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Kemudian peneliti melakukan uji atas hipotesis yang diajukan. Terakhir peneliti akan menyimpulkan hasil dari uji hipotesis tersebut. Untuk mengetahui tingkat determinasi antar variabel maka dilakukan analisis Koefisien Determinasi (R^2) yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai R menunjukkan besarnya pengaruh, sedangkan nilai R Square menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan maka akan digunakan uji F. Selanjutnya, untuk melihat pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y dengan menggunakan uji t.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tarakan Tahun anggaran 2013-2022 diketahui bahwa pada tahun 2013 penerimaan pendapatan asli daerah mencapai Rp 94.014.016.148,75. Tahun 2014 sampai 2016 presentase pendapatan asli daerah mengalami penurunan secara fluktuatif dengan persentase penurunan berturut-turut sebesar -6,33%, -13,17%, dan 18,65%. Namun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dengan persentase pertumbuhan secara berturut-turut sebesar 7,87%, 7,91%, 1,14%, 10,18% dan 86,15%. Sedangkan Tahun 2022 pendapatan asli daerah kembali mengalami penurunan dengan persentase sebesar -5,02%.

Dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Tarakan selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2013 penerimaan dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat mencapai Rp 1.078.974.437.132 dan menurun -1,62% pada tahun selanjutnya. Tahun 2015 dana perimbangan sempat meningkat sebesar 42,72% dari tahun sebelumnya. Namun Tahun 2017 penerimaan dana perimbangan kembali menurun sebesar -16,48%. Kemudian tahun 2018 dan tahun 2019 kembali meningkat sebesar 23,12%, dan 5,75%. Pada tahun 2020 penerimaan dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar -8,03%. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan dana perimbangan kembali mengalami peningkatan yang fluktuatif yaitu sebesar 8,29%, dan 10,81%.

Kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan menggunakan analisis rasio kemandirian mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan sebesar 8,71% dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya menjadi 8,30%. Namun pada tahun 2015 tingkat kemandirian keuangan meningkat menjadi 15,56%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 8,87% dan meningkat menjadi 11,45% pada Tahun 2017. Kemudian Tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan berturut-turut menjadi 10,04% dan 9,60%. Namun demikian pada 3 tahun berikutnya yaitu Tahun 2020, 2021, 2022 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 11,50%,

19,77% dan 16,95%.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tarakan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 25.0 untuk analisis linier berganda, besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh koefisien partial sebesar 0.773 dan koefisien determinasi sebesar 0.598 atau berarti bahwa 59,8% variabilitas dari variabel Y (kemandirian keuangan daerah) dapat diterangkan (dipengaruhi) oleh variabel X1 (pendapatan asli daerah). Pendapatan asli daerah memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 77,3%, artinya bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka akan semakin meningkat tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 77,3% sedangkan sisanya 22,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil analisis koefisien korelasi dari variabel X1 dengan variabel Y yang diteliti diperoleh koefisien partial sebesar 0,773. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang kuat karena berada diantara 0,60 – 0,799.

Dari hasil koefisien regresi pendapatan asli daerah (X1) sebesar (1,241) dalam hal ini berarti setiap meningkatnya (X1) sebesar 1% dan dana perimbangan (X2) tetap, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 124,1%.

Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan uji t pada perhitungan hasil SPSS versi 16.00 yang tersaji pada untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai t-hitung = 14,917 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan $df = (n-k-1) = 8$ maka nilai t-tabel = 2,306 dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai t-hitung > t-tabel dan berdasarkan probabilitas nilai signifikan sebesar 0,000 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha 0,05$) sehingga $sig < \alpha$ atau $0,000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak H_a diterima atau pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tarakan, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin pula tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Andriani dan wahid, 2018; Malau dan Parapat, 2020; Nurkhayati, 2022; dan Machfud, dkk 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis pada realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Tarakan, mencerminkan bahwa pada tahun periode yang diteliti oleh penulis, pendapatan asli daerah yang diperoleh selama 10 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pengaruh Dana Perimbangan Secara Parsial Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 25.0 untuk variabel X2 (dana perimbangan) terhadap variabel Y (kemandirian keuangan daerah) diperoleh koefisien partial sebesar 0,355 dan koefisien determinasi sebesar 0,126, berarti bahwa 12,6 % variabilitas dari variabel Y (kemandirian keuangan daerah) dapat diterangkan (dipengaruhi) oleh variabel X2 (dana perimbangan). Dana perimbangan memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 35,5%, artinya bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah maka akan semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 12,6% sedangkan sisanya 87,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil koefisien korelasi dari variabel X2 dengan variabel Y yang diteliti diperoleh dari koefisien partial sebesar 0,355. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang rendah karena berada diantara 0,20 – 0,399.

Dari hasil koefisien regresi dana perimbangan (X2) sebesar (-1,376) dalam hal ini

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

berarti setiap meningkatnya (X2) sebesar 1% dan PAD (X1) tetap, maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar -37,6%

Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan uji t pada perhitungan hasil SPSS versi 25.00 untuk variabel dana perimbangan diperoleh nilai t-hitung -9,931 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 dan $df = (n-k-1) = 8$ maka nilai t-tabel = $\pm 2,306$ dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai t-hitung < t-tabel ($-9,931 < -2,306$), dan berdasarkan probabilitas nilai signifikan sebesar 0,00 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha 0,05$) sehingga $sig < \alpha$ atau $0,00 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil pengolahan data spss diatas, dapat diartikan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Andriani dan wahid, 2018; Machfud, dkk, 2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Secara Simultan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS 25.0 diperoleh koefisien determinasi angka R^2 (R Square) sebesar 0,973 atau 97,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 97,3%. atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 97,3% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 2,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

97,3% sedangkan 2,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transfer dari provinsi dan pinjaman daerah.

Hasil koefisien korelasi dari variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti diperoleh nilai r sebesar 0,987. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat karena berada diantara 0,80 – 1,000.

Dari hasil koefisien regresi konstanta sebesar 11,42 menyatakan bahwa pada saat variabel bebasnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bernilai 0 maka kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 11,42.

Dari hasil perhitungan uji simultan yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tarakan. Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh perhitungan uji simultan pada tabel anova nilai F sebesar 127,752, sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) diperoleh F -tabel dengan batasan $F(n-k-1)$ sebesar 4,46. Ternyata harga F -hitung lebih besar dari F -tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil perhitungan uji simultan pada tabel anova diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha 0,05$) sehingga $\text{sig} < \alpha$ atau $0,00 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima atau pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil pengolahan data spss diatas, dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Andriani dan wahid, 2018; Machfud, dkk, 2020; Nurkhayati, 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian daerah pada pemerintah kota Tarakan tahun anggaran 2013 sampai 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tarakan.
 - a. Pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selama periode 2013 sampai 2022 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Hal ini dikarenakan pemerintah terus memperluas sumber penerimaan asli daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan sumber pendapatan asli daerah. Meskipun dalam tahun-tahun awal mengalami kendala ekonomi dan sosial yang mengakibatkan terjadinya penurunan
 - b. Dana perimbangan yang diterima berasal dari dana bagi hasil pajak dari pusat, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pada selama 10 tahun tersebut penerimaan dana perimbangan selalu meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk menjalankan program pemerintah yaitu belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat. Sehingga pemerintah memerlukan dana perimbangan untuk menutupi defisit anggaran.
 - c. Kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dan peningkatan. Selama 10 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2013 – 2022 Kota Tarakan masuk dalam kategori kurang karena berada di antara 10,01 – 20,00. Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah Tarakan dalam membiayai belanja daerahnya yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka meningkat pula tingkat kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.

3. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima lebih kecil akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.
4. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun ada beberapa faktor lain yang tidak diteliti penulis yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah

6. REFERENSI

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun (2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39
- Bratakusumah & Deddy, S (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Elmi, Bachrul (2002) *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Halim, Abdul (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2011). *Pengendalian Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Damayanti T.W. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Halim, Abdul (2002). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Halim, Abdul dan Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Malau, Eve Ida, & Parapat, Eka Pratiwi Septania (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, *Jurnal EK&BI*, Volume 3, Nomor 2 Desember.
- Machfud, Asnawi, Naz'aina (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, *Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind)*, Vol.5 No.1 Januari–Juni
- Mutiara, Maimunah (2008) Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 11, No 1, Hal 37-51.
- Nurkhayati, Eko Diyah (2022) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo, *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi)*, Vol. 11 No. 01, 31 Januari
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perubahan atas Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Perubahan atas Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Umar, Husein (2003) Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, HAW (2002) Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta